



PT. JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT

2020

AUDIT REPORT

LAPORAN KEUANGAN

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN 2019**

DISERTAI LAPORAN AUDIT INDEPENDENT

terdaftar dan diawasi oleh :



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2020

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT JAMKRIDA JABAR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Teguh Budiman
Alamat Kantor	: Jl. Soekarno Hatta No. 592 Buah Batu Bandung, Jawa Barat 40286
Jabatan	: Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Bandung, 12 April 2020



Teguh Budiman
Direktur Utama

**PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

	Halaman
Daftar Isi	
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 44

No: 00106/2.1000/AU.1/09/1290-1/1/IV/2021

Laporan Auditor Independen / Independent Auditors' Report

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Jamkrida Jabar**

***The Shareholders, Board of
Commissioners and Board of Directors
PT Jamkrida Jabar***

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Jamkrida Jabar ("the Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310

Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434

Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com

NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015

atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Perusahaan untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, dengan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tertanggal 6 April 2020.

of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jamkrida Jabar as of December 31, 2020, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matters

The accompanying financial statements of the Company on December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditor, who expressed an unmodified opinion on such financial statements on April 6, 2020.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN

Aryo Wibisono, S.E., CPA.

Register Akuntan Publik / Register of Public Accountant No. AP.1290
Jakarta, 12 April/ April 12, 2021



PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4	187.692.641.037	171.333.693.369
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(13.497.571.767)	--
Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 9	63.482.837.592	49.163.245.665
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian		(1.563.069.474)	--
Piutang Re/Cogransi	2e, 5	8.784.558.543	3.455.037.602
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2d, 2j, 6	1.306.355.722	1.089.865.915
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	2f, 8a	16.840.152.576	18.399.378.341
Piutang Lain-lain	7	79.179.963	123.387.312
Properti Investasi	10	2.495.100.000	2.472.000.000
Total Aset Lancar		265.620.184.191	246.036.608.204
ASET TIDAK LANCAR			
Beban Dibayar Dimuka	2f, 8b	56.017.394.440	94.168.001.739
Aset Tetap - Bersih	2g, 3b, 11	13.337.301.918	12.325.175.523
Aset Pajak Tangguhan	2o, 20d	12.325.176.578	7.270.568.929
Aset Lain-Lain	2i, 2k, 12	152.516.054	348.805.025
Total Aset Tidak Lancar		81.832.388.990	114.112.551.216
JUMLAH ASET		347.452.573.181	360.149.159.420

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	2o, 21a	390.483.466	383.573.008
Utang Re/Cogaransi	13	6.553.051.703	4.572.288.614
Utang Klaim	14	1.914.592.578	--
Beban yang Masih Harus Dibayar	15	377.243.525	898.401.062
Penampungan Sementara	16	6.133.524.634	4.008.552.513
Utang Lancar Lainnya	17	5.245.250	12.894.322
Pendapatan Diterima Dimuka	18a	31.261.353.899	32.073.362.791
Total Liabilitas Jangka Pendek		46.635.495.055	41.949.072.310
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima Dimuka	18b	91.805.863.573	151.295.084.398
Cadangan Klaim	2r, 19	6.482.596.741	4.050.464.351
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2n, 20	2.347.153.380	1.776.025.038
Total Liabilitas Jangka Panjang		100.635.613.694	157.121.573.787
JUMLAH LIABILITAS		147.271.108.749	199.070.646.097
EKUITAS			
Modal	22	153.200.000.000	153.200.000.000
Modal dasar sebesar dari 30.000 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 15.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 10.000.000 per lembar saham.			
Cadangan Umum	22	35.601.299.677	4.094.651.887
Saldo Laba	22	8.730.878.772	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2d, 3a, 3b, 8	2.927.569.407	87.155.374
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	2n, 20	(278.283.424)	(211.204.526)
JUMLAH EKUITAS		200.181.464.432	161.078.513.323
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		347.452.573.181	360.149.159.420

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan / Kafalah	2p, 23	130.550.626.733	47.732.911.078
Beban Akuisisi	2p, 23	(22.669.038.213)	(6.835.633.831)
Restitusi IJP	2p, 23	(2.467.490.149)	(1.773.299.834)
Manajemen Fee	2p, 23	7.397.624.253	3.219.841.076
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN		112.811.722.624	42.343.818.489
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2t, 25	(42.487.066.581)	(22.636.374.896)
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	2t, 25	2.725.385.218	(858.424.997)
Beban Regaransi	2t, 25	(57.600.884.828)	(14.268.883.642)
JUMLAH BEBAN KLAIM		(97.362.566.191)	(37.763.683.535)
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH		15.449.156.433	4.580.134.954
Pendapatan Investasi	2d, 2j, 24	17.265.452.830	14.935.391.990
Pendapatan Subrogasi	2r, 27	1.815.942.976	3.218.321.634
Pendapatan (Beban) Lain-lain	28	(13.257.261.723)	(2.379.181.041)
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	26	(1.379.402.701)	(2.001.361.567)
Beban Sumber Daya Manusia	26	(11.817.030.102)	(11.415.120.309)
Beban Administrasi dan Umum	26	(3.883.745.395)	(3.422.310.413)
JUMLAH BEBAN USAHA		(17.080.178.198)	(16.838.792.289)
LABA SEBELUM PAJAK		4.193.112.318	3.515.875.248
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2o, 21b	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	2o, 21d	4.537.766.453	392.035.340
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		4.537.766.453	392.035.340
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		8.730.878.772	3.907.910.588
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Kerja		(89.438.531)	(90.055.996)
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja		22.359.633	22.513.999
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
POS-POS YANG AKAN DIREKLASIFIKASIKAN KE LABA RUGI			
Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		2.247.643.470	122.524.299
Pajak Tangguhan Terkait Pengukuran Keuntungan (Kerugian) Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif		494.481.563	30.631.075
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		2.675.046.135	85.613.377
LABA KOMPREHENSIF		11.405.924.906	3.993.523.965

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal Disetor	Cadangan Umum	Selisih Nilai Wajar Obligasi	Keuntungan (kerugian) imbalan pasti setelah aset pajak tangguhan	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2018		153.200.000.000	3.761.254.328	(66.000.000)	(143.662.529)	1.333.590.235	158.085.182.034
Modal Disetor	21	--	--	--	--	--	--
Cadangan Umum	21	--	333.397.559	--	--	(333.397.559)	--
Pembagian Dividen	21	--	--	--	--	(681.464.610)	(681.464.610)
Bonus dan Tantiem	21	--	--	--	--	(292.056.261)	(292.056.261)
CSR	21	--	--	--	--	(26.671.805)	(26.671.805)
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	--	3.907.910.588	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	--	--	153.155.374	--	--	153.155.374
Penghasilan komprehensif lain		--	--	--	--	--	--
imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan	2n, 19	--	--	--	(67.541.997)	--	(67.541.997)
Saldo per 31 Desember 2019		153.200.000.000	4.094.651.887	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	161.078.513.323
Dampak Penerapan PSAK 71 dan 72		--	30.529.670.143	--	--	--	30.529.670.143
Saldo per 1 Januari 2020 Setelah Penerapan PSAK 71 dan 72		153.200.000.000	34.624.322.030	87.155.374	(211.204.526)	3.907.910.588	191.608.183.466
Modal Disetor	21	--	--	--	--	--	--
Cadangan Umum	21	--	976.977.647	--	--	(976.977.647)	--
Pembagian Dividen	21	--	--	--	--	(1.996.942.310)	(1.996.942.310)
Bonus dan Tantiem	21	--	--	--	--	(855.832.418)	(855.832.418)
CSR	21	--	--	--	--	(78.158.213)	(78.158.213)
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	--	8.730.878.772	8.730.878.772
Selisih Nilai Wajar Obligasi	2d, 3a, 3b, 8	--	--	2.840.414.033	--	--	2.840.414.033
Penghasilan komprehensif lain		--	--	--	--	--	--
imbalan kerja setelah aset pajak tangguhan	2n, 19	--	--	--	(67.078.898)	--	(67.078.898)
Saldo per 31 Desember 2020		153.200.000.000	35.601.299.677	2.927.569.407	(278.283.424)	8.730.878.772	200.181.464.432

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		83.622.695.642	68.462.218.286
Pembayaran Klaim		(35.414.956.395)	(28.025.192.952)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok		(36.827.696.993)	(15.844.626.943)
Pembayaran Pajak		(738.614)	(2.819.358.853)
Pendapatan Subrogasi		1.815.942.980	3.218.321.634
Pendapatan lain-lain		3.348.844.798	440.177.812
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		16.544.091.418	25.431.538.985
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan		(11.973.659.457)	(6.892.408.849)
Penerimaan Investasi		17.048.963.019	14.669.680.535
Properti Investasi		--	(27.000.000)
Pengeluaran Untuk Pengadaan Aset Tetap		(2.758.285.575)	(189.303.500)
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap		426.000.000	--
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain lain		2.771.204	(95.779.500)
Aset Dalam Penyelesaian		--	(343.502.100)
KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI		2.745.789.191	7.121.686.586
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembentukan Cadangan Umum		--	2.079.122.528
Pembagian Dividen		(1.996.942.310)	(2.098.040.093)
Pembagian Bonus dan Tantiem		(855.832.418)	(899.160.040)
CSR		(78.158.213)	(82.115.072)
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		(2.930.932.941)	(1.000.192.676)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		16.358.947.668	31.553.032.895
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		171.333.693.369	139.780.660.474
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	187.692.641.037	171.333.693.369
Kas dan Setara Kas terdiri atas :			
Kas		353.933.580	140.067.568
Giro Bank		15.372.682.419	8.831.798.605
Deposito		171.966.025.038	162.361.827.196
Jumlah Kas dan Setara Kas		187.692.641.037	171.333.693.369

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan informasi umum

PT JAMKRIDA JABAR, selanjutnya disebut "Perusahaan", dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan Perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan mempunyai Unit Usaha Syariah pada tahun 2015. Unit Usaha Syariah dibentuk oleh Keputusan Direksi PT JAMKRIDA JABAR Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh izin-izin sebagai berikut:

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 503/014/DP-SKJ/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Nomor Izin Berusaha (NIB) 9120304971535 yang di tetapkan pada tanggal 13 September 2019.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618463 tanggal 12 September 2018 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

b. Usaha

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanaan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kafalah Pembiayaan Syariah adalah suatu kegiatan pelengkap bagi suatu pembiayaan dengan pola syariah, dengan demikian harus terdapat akad/perjanjian pembiayaan antara Terjamin (*Makfuul 'Anhu*) dan Penerima Jaminan (*Makfuul Lahu*). Namun demikian karena Kafalah Pembiayaan berfungsi sebagai substitusi agunan maka PT Jamkrida Jabar melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kafalah dapat menjadi dasar ditandatanganinya suatu perjanjian pembiayaan. Seluruh kegiatan Kafalah Pembiayaan mengacu pada fatwa DSN-MUI.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (LANJUTAN)

c. Tempat Usaha

Perusahaan beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta No. 592 Buah batu Bandung, Jawa Barat 40286. Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah. Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

d. Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pemegang Umum Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 26 November 2019, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota : Khozin Abu Faqih, Lc.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rodhiallah
Komisaris Perseroan : Syafrial Firdaus
Komisaris Independen : Dini Rosdini

Direksi

Direktur Utama : Tri Budhi Muljawan
Direktur Keuangan : Budi Setyono
Direktur Operasional : Asep Gunawan Sirad

Berdasarkan Akta Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) Nomor: 77 tanggal 26 November 2020, susunan pengurus PT Jamkrida Jabar pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA
Anggota : Khozin Abu Faqih, Lc.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Dini Rosdini

Direksi

Direktur Utama : Teguh Budiman
Direktur Keuangan : Budi Setyono

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Jamkrida Jabar Nomor 38 tanggal 28 November 2014 dan Surat Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Nomor : U-388/DSN-MUI/XI/2014 tanggal 27 November 2014 yang merekomendasikan dan menetapkan Zaini Abdul Malik, S. Ag., MA sebagai Ketua dan Khozin Abu Faqih, Lc sebagai Wakil Ketua.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 01 tanggal 03 Januari 2017, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Rodhiallah dan Tuan Syafrial Firdaus sebagai Komisaris dan Tuan Asep Gunawan Sirad sebagai Direktur Operasional, terhitung efektif sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2020. Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 39 tanggal 26 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Ny. Dini Rosdini sebagai Komisaris Independen untuk periode 2019-2023.

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia. Standar Akuntansi yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

b. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, manajemen Perusahaan menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan PSAK baru yang signifikan adalah PSAK 71 "Instrumen Keuangan", PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Dampak dari penerapan PSAK baru tersebut dijelaskan di bawah ini.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan instrumen keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Perusahaan menerapkan model baru kerugian ekspektasian dengan perkiraan masa depan, menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dan pendekatan umum untuk aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan lainnya.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 71, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 71 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (Lanjutan)

PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Sesuai dengan ketentuan PSAK 72, Perusahaan telah menerapkan metode pengakuan pendapatan menggunakan penilaian yang dipersyaratkan dalam standar baru. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan diakui ketika pengendalian atas barang atau jasa yang dijanjikan telah berpindah kepada pelanggan.

Sesuai ketentuan transisi PSAK 72, Perusahaan telah memilih untuk tidak menyajikan kembali periode komparatif. Dampak kumulatif dari penerapan PSAK 72 pada tanggal 31 Desember 2019 akan diakui oleh Perusahaan sebagai penyesuaian saldo laba per 1 Januari 2020.

PSAK dan ISAK Lainnya

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK No.1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Amandemen PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan.
- Penyesuaian 2019 PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan.
- Revisi 2019 Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- PSAK No. 73: Sewa.
- PSAK No. 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

(i) Klasifikasi

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penerapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang mempengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual diperoleh).

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(i) Klasifikasi (Lanjutan)

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Perusahaan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai tukar diakui pada laba rugi komprehensif lain (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ii) Pengakuan awal (Lanjutan)

Perusahaan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Kebijakan akuntansi berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan akuntansi berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perusahaan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (Lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing masing diakui dalam laporan laba rugi.

(v) Reklasifikasi aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada wajar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi.

Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(v) Reklasifikasi aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

- dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- terjadi setelah Perusahaan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perusahaan telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perusahaan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perusahaan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

(vi) Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

(vii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(viii) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Perusahaan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

- Perusahaan mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Perusahaan menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang pada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Perusahaan).
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan. Kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi.
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (Lanjutan)

Penyajian penyisihan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Perusahaan untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok dan bunga;
- c. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- d. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

Perusahaan pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Perusahaan akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Perusahaan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurang melalui akun cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

d. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

(ix) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (Lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralized financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari utilisasi dari jaminan deposit yang diberikan oleh pelanggan kepada Perusahaan.

Estimasi tahun antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu berdasarkan jenis pelanggan.

Arus kas masa datang dari aset keuangan Perusahaan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada tahun terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada tahun historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Ketika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapusbukukan dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan, dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada tahun berjalan, dikreditkan pada cadangan kerugian penurunan nilai, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan, dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

e. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee* dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra *co-guarantee* dan mitra *re-guarantee*.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang *co-guarantee* pada saat mitra *co-guarantee* mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan mitra *co-guarantee*), namun pembayaran belum dilakukan.

f. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban *co-guarantee*, beban *re-guarantee*, beban akuisisi dibayar di muka diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan/ Kafalah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

g. Aset Tetap

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap". Revisi PSAK No. 16 ini mengatur akuntansi tanah dan mencabut PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Penerapan SAK revisi ini tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut:

Bangunan Gedung	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aset.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

h. Aset Tidak Berwujud

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dihapuskan dari akun tersebut. Keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi. Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai yang dipakai.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

h. Aset Tidak Berwujud (Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik aset tetap untuk memastikan sisa masa manfaat, nilai residu, dan metode penyusutan masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan penelaahan untuk memutuskan apakah terdapat indikasi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat dan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Perusahaan menilai apakah umur manfaat aset tidak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Aset tidak berwujud dianggap oleh Perusahaan memiliki umur manfaat tidak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode aset diperkirakan menghasilkan arus kas neto untuk entitas.

Jumlah tersusutkan aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Amortisasi dihentikan pada tanggal yang lebih awal antara ketika aset tersebut dikelompokkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (atau dimasukkan dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan dalam aset yang dimiliki untuk dijual. Metode amortisasi yang digunakan menggambarkan perkiraan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomi masa depan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka digunakan metode garis lurus.

1. Lisensi

Lisensi disajikan berdasarkan harga perolehan lisensi memiliki masa manfaat yang terbatas dan disajikan berdasarkan harga perolehan diikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

2. Piranti Lunak Komputer

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun). Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan bertujuan untuk mengalokasikan harga perolehan lisensi selama estimasi masa manfaatnya (4 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya overhead yang terkait.

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dari empat tahun).

Pada setiap tanggal pelaporan Perusahaan melakukan rivi periodik atas aset tak-berwujud untuk memastikan periode amortisasi dan metode amortisasi masih sesuai dengan estimasi sebelumnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

i. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan milik Perusahaan, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aset atau unit penghasil kas adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, aset yang tidak dapat diuji secara individual akan digabungkan dalam kelompok yang lebih kecil yang memberikan arus kas masuk dari penggunaan berkelanjutan yang sebagian besar independen terhadap arus kas masuk atas aset lainnya atau kelompok aset ("unit penghasil kas" atau "UPK").

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pemulihan rugi penurunan nilai, untuk aset non keuangan, diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi.

j. Pendapatan Bunga/ Bagi Hasil

Pendapatan bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tetap mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umum dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

k. Aset Lain-Lain

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomi masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi Perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh *lessee* dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa *lessee* kepemilikan pada akhir masa sewa.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

I. Sewa

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang bersangkutan.

m. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

n. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja". Revisi SAK ini antara lain memperbolehkan entitas untuk menerapkan metode sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari keuntungan/kerugian aktuarial yang timbul dari imbalan pasti, antara lain pengakuan langsung keuntungan/kerugian yang terjadi pada tahun berjalan ke dalam pendapatan komprehensif lain.

Perusahaan memilih metode ini dalam pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial, karenanya penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2013) ini berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Untuk program iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2013), beban imbalan pasca kerja manfaat pasti ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* dan keuntungan dan kerugian aktuarial diakui pada tahun dimana keuntungan dan kerugian terjadi dalam pendapatan komprehensif lain.

Biaya jasa lalu atas pengenalan program manfaat pasti atau perubahan utang imbalan dari program yang ada diamortisasi sepanjang tahun sampai imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode penilaian aktuarial *Projected Unit Credit* di mana keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu langsung diakui dalam tahun berjalan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar di antara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut dan 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian ini diakui dengan metode garis lurus sepanjang rata-rata sisa masa kerja dari karyawan.

o. Pajak Penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan" yang menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan mendatang dari pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi dan kejadian lain dari tahun kini yang diakui dalam laporan keuangan. SAK revisi ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" Penerapan awal SAK revisi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perusahaan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

o. Pajak Penghasilan (Lanjutan)

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui pada saat Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) diterbitkan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK).

Batas waktu maksimal pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun. Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban regaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan/ kafalah disajikan secara bruto sebelum dikurangkan beban komisi agen, beban *co-guarantee* dan beban *re-guarantee*.

Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. *Fee based income* bank pelaksana dan beban regaransi yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan dijanjikan dalam kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahkannya barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki pengendalian atas barang atau jasa tersebut).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

p. Imbal Jasa Penjaminan, Imbal Jasa Kafalah, *Fee Based Income* Bank Pelaksana, dan Beban Regaransi (Lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu
Perusahaan mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, umumnya Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu jika pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja Perusahaan saat Perusahaan melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut.
- b. Kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu
Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu dimana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan Perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

Imbal jasa penjaminan atas risiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas risiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

q. Utang Klaim

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah utang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang macet.

r. Cadangan Klaim

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Estimasi atas klaim yang terjadi baik sudah dilaporkan maupun belum dilaporkan diakui sebagai cadangan klaim. Perusahaan telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan. Cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

Estimasi klaim atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai piutang penjamin ulang dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara total saldo penjaminan bruto dan total saldo penjaminan netto.

Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Hak subrogasi atas klaim diakui sebagai pendapatan subrogasi pada saat hak subrogasi dapat direalisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

r. Cadangan Klaim

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.5/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 22 poin 1 (a) bahwa Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri; atau (b) penjumlahan 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, mana yang lebih banyak. Pada poin 2 bahwa klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rata-rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

s. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- 2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a),
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

t. Beban Klaim

Beban klaim setelah dikurangi bagian penjamin ulang, dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim.

u. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Berlaku sejak 1 Januari 2020

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Perusahaan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Perusahaan mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Perusahaan mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Berlaku sebelum 1 Januari 2020

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapus-bukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (LANJUTAN)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

a. Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap tersebut.

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

d. Imbalan Kerja jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut. Asumsi asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 18 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi ke masa depan dan oleh karena itu, secara umum berdampak pada beban yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang. Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Klaim dan Piutang Regaransi

Cadangan klaim dan Piutang Regaransi diukur dengan mengacu pada penurunan nilai yang diatur dalam PSAK 71, dan estimasian yang dibentuk dengan mempertimbangkan perkembangan klaim yang telah terjadi, nilai seluruh penjaminan, faktor ekonomi yang relevan dan terkorrelasi, serta probabilitas tertimbang atas skenario-skenario ekonomi yang mungkin terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas	353.933.580	140.067.568
Giro Bank		
Bank Umum	6.986.375.573	5.320.954.926
Bank BPR	3.812.020.095	1.311.877.239
Bank BPR Syariah	3.711.295.128	1.338.786.972
Bank Umum Syariah	862.991.623	860.179.468
Jumlah Giro Bank	15.372.682.419	8.831.798.605
Deposito		
Bank Umum	81.276.025.038	90.771.827.196
Bank Umum Syariah	39.550.000.000	26.550.000.000
Bank BPR Syariah	32.275.000.000	31.375.000.000
Bank BPR	18.865.000.000	13.665.000.000
Jumlah Deposito	171.966.025.038	162.361.827.196
Jumlah Kas dan Setara Kas	187.692.641.037	171.333.693.369
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(13.497.571.767)	--
Jumlah Kas dan Setara Kas - Bersih	174.195.069.270	171.333.693.369

Penempatan deposito PT Jamkrida Jabar pada tanggal 31 Desember 2020 di beberapa bank di Indonesia mendapatkan tingkat suku bunga dari 4,25% p.a. s/d 9,50% p.a dan per 31 Desember 2019 mendapatkan tingkat suku bunga dari 5,25% p.a. s/d 11,04% p.a.

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	--	--
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	4.421.648.791	--
Penyisihan Tahun Berjalan	9.075.922.976	--
Saldo Akhir	13.497.571.767	--

5. PIUTANG RE/COGARANSI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Re/Cogaransi	8.784.558.543	3.455.037.602
Jumlah Piutang Re/Cogaransi	8.784.558.543	3.455.037.602

Piutang Re/Cogaransi merupakan tagihan atas klaim dan restitusi kepada broker Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE) dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, piutang estimasian atas Re/Cogaransi masing-masing sebesar Rp3.757.211.523 dan Nihil.

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Bunga Investasi	689.835.187	760.813.131
Pendapatan Management Fee	616.520.535	329.052.784
Jumlah Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.306.355.722	1.089.865.915

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA (LANJUTAN)

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga investasi yang berasal dari deposito, pendapatan kupon obligasi atas investasi, komisi atas Re/Cogaransi (*management fee*).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Karyawan	71.429.467	122.733.535
Piutang Pihak Ketiga	175.000	--
Piutang Lainnya	7.575.496	653.777
Jumlah Piutang Lain-lain	79.179.963	123.387.312

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

a. Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Re/Cogaransi	11.445.220.929	11.920.744.498
Biaya Akuisisi	5.179.302.443	4.885.094.765
Beban Operasional Dibayar Dimuka	185.629.204	155.469.784
Uang Muka	30.000.000	--
Biaya Klaim Ditangguhkan	--	1.438.069.294
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Pendek	16.840.152.576	18.399.378.341

b. Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Re/Cogaransi	40.293.239.977	65.310.266.580
Biaya Akuisisi	15.724.154.463	24.906.986.397
Beban Klaim Ditangguhkan	--	3.950.748.762
Jumlah Beban Dibayar Dimuka Jangka Panjang	56.017.394.440	94.168.001.739

Beban operasional dibayar dimuka dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Re/Cogaransi, Biaya Akuisisi diamortisasi sesuai dengan pola pengakuan Imbal Jasa Penjaminan dengan menggunakan pola risiko.

Imbal jasa penjaminan atas resiko yang dialihkan ke penjamin ulang diakui sebagai beban premi penjaminan ulang yang diakui sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Biaya-biaya atas perolehan kontrak diakui sebagai biaya inkremental, biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan, biaya tersebut diamortisir secara sistematis sesuai pola pengakuan imbal jasa penjaminan. Penerimaan dari pelanggan atas resiko yang belum terealisasi diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.

Beban dibayar dimuka Re/Cogaransi merupakan pembayaran IJP dan IJK tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Re/Cogaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP dan IJK Re/Cogaransi dan fee based income bank telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERTARGA

Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif

Surat Bertarga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2020	31 Desember 2019
FR 72	8,25%	15/05/2036	--	19.398.000.000	--
PBS 028	7,75%	15/10/2046	--	5.252.500.000	--
FR 76	7,38%	15/05/2048	--	5.115.000.000	--
Waskita Karya THP II TH 2018	8,25%	23/02/2023	idA	3.000.000.000	3.000.000.000
FR 68	8,38%	15/03/2034	--	2.166.000.000	--
PLN Th 2019 SERI B	8,70%	06/06/2027	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000
PLN Th 2019 SERI C	8,70%	06/06/2027	idAAA	2.000.000.000	2.000.000.000
PT Multi Sarana	8,50%	25/06/2022	--	2.000.000.000	2.000.000.000
PBS 15	8,00%	15/07/2047	--	1.057.000.000	2.918.133.000
PT Bank BJB	8,15%	06/12/2022	idAA-	1.016.000.000	--
PT PP THP I 2020	9,90%	27/02/2027	idA	1.000.000.000	--
FR 59	7,00%	15/05/2027	--	--	2.066.000.000
PT PP	10,20%	24/02/2020	--	--	1.016.500.000
FR 75	7,50%	15/05/2038	--	--	4.995.000.000
FR 83	7,50%	15/04/2040	--	--	4.918.921.386
FR 82	7,00%	15/09/2030	--	--	3.968.000.000
FR 80	7,50%	15/06/2035	--	--	2.997.000.000
PBS 022	8,60%	15/04/2034	--	--	2.126.000.000
Harga Perolehan				44.004.500.000	34.005.554.386
Selisih Nilai Wajar Surat Bertarga				2.324.400.000	87.155.374
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif				46.328.900.000	34.092.709.760
Reksadana					
Reksadana MNC Dana SBN				6.000.000.000	1.000.000.000
Harga Perolehan				6.000.000.000	1.000.000.000
Selisih Nilai Wajar Reksadana				107.977.499	(710.345)
Jumlah Reksadana				6.107.977.499	999.289.655

Aset Keuangan yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi

Surat Bertarga	Kupon	Jatuh Tempo	Rating	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Hutama Karya	8,07%	06/06/2027	idAAA	6.000.000.000	6.000.000.000
Waskita Karya THP I TH 2017	8,50%	06/10/2022	idA	5.000.000.000	5.000.000.000
KAI Th 2017 SERI A	7,75%	21/12/2022	idAAA	--	1.000.000.000
KAI Th 2017 SERI B	8,25%	21/11/2024	idAAA	--	2.000.000.000
PBS013	6,25%	13/05/2019	--	--	--
FR0059	8,70%	15/05/2027	--	--	--
FR0061	8,50%	15/05/2022	--	--	--
PBS014	8,25%	15/05/2021	--	--	--
Harga Perolehan				11.000.000.000	14.000.000.000
Diskonto Obligasi				--	--
Premium Obligasi				45.960.093	71.246.250
Jumlah Obligasi yang Diukur Pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi				11.045.960.093	14.071.246.250
Jumlah Aset Keuangan				63.482.837.592	49.163.245.665
Dikurangi: Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian				(1.563.069.474)	--
Jumlah Aset Keuangan - Bersih				61.919.768.118	49.163.245.665

Aset Keuangan Perusahaan merupakan Investasi dalam bentuk Obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif dan obligasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penentuan kategori aset keuangan dilakukan oleh manajemen.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

9. SURAT BERTAHAP (LANJUTAN)

Perubahan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian

	Tahun yang Berakhir Pada Tanggal	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	--	--
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	151.425.000	--
Pemulihan Tahun Berjalan	1.411.644.474	--
Saldo Akhir	1.563.069.474	--

10. PROPERTI INVESTASI

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	2.472.000.000	2.472.000.000
Penambahan	--	--
Keuntungan atas perubahan nilai wajar	23.100.000	--
Saldo Akhir	2.495.100.000	2.472.000.000

Akun properti investasi merupakan investasi dalam bentuk tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan, tetapi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi Perusahaan berupa pendapatan sewa.

Aset-aset tersebut telah dilakukan penilaian ulang oleh penilai independen pada tanggal 18 Februari 2020 dengan laporan yang diterbitkan oleh KJPP Aditya Iskandar & Rekan No. 00156/2.0003-01/PI/07/0293/1/III/2020 dan 0153/2.0003-01/PI/07/0293/1/III/2020 pada tanggal 2 Maret 2020 dengan nilai sebesar Rp2.495.100.000.

11. ASET TETAP

	31 Desember 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.952.739.327	729.363.800	--	2.682.103.127
Kendaraan	2.887.890.000	1.903.650.000	(1.033.950.000)	3.757.590.000
Gedung	7.254.550.554	125.271.775	--	7.379.822.329
Tanah	3.463.500.000	--	--	3.463.500.000
Aset dalam Penyelesaian	626.031.600	--	(626.031.600)	--
Jumlah	16.184.711.481	2.758.285.575	(1.659.981.600)	17.283.015.456
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.528.168.503)	(323.838.324)	--	(1.852.006.827)
Kendaraan	(1.645.138.876)	(367.149.937)	775.462.500	(1.236.826.313)
Gedung	(686.228.579)	(170.651.819)	--	(856.880.398)
Jumlah	(3.859.535.958)	(861.640.080)	775.462.500	(3.945.713.538)
Nilai buku	12.325.175.523			13.337.301.918
	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Inventaris Kantor	1.897.465.327	55.274.000	--	1.952.739.327
Kendaraan	2.887.890.000	--	--	2.887.890.000
Gedung	7.120.521.054	134.029.500	--	7.254.550.554
Tanah	3.463.500.000	--	--	3.463.500.000
Aset dalam Penyelesaian	--	626.031.600	--	626.031.600
Jumlah	15.369.376.381	815.335.100	--	16.184.711.481

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

11. ASET TETAP (LANJUTAN)

	31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.236.702.918)	(291.465.585)	--	(1.528.168.503)
Kendaraan	(1.369.192.875)	(275.946.001)	--	(1.645.138.876)
Gedung	(516.955.812)	(169.272.767)	--	(686.228.579)
Jumlah	(3.122.851.605)	(736.684.353)	--	(3.859.535.958)
Nilai buku	12.246.524.776			12.325.175.523

Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan bencana alam dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp15.000.000.000 pada PT Asuransi Jasa Raharja Putera.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke tiap-tiap akun aset tetap yang bersangkutan dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai tujuannya semula.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungan.

Penjualan aset tetap pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020
Harga Jual	426.000.000
Nilai Buku	258.487.500
Keuntungan penjualan aset	167.512.500

12. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Software	801.803.255	693.422.255
Aset Lainnya	22.000.000	461.600.000
Harga Perolehan Aset Lain-Lain	823.803.255	1.155.022.255
Akumulasi Amortisasi Software	(655.245.534)	(540.163.068)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(16.041.667)	(266.054.162)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain-Lain	(671.287.201)	(806.217.230)
Nilai Buku Aset Lain-lain	152.516.054	348.805.025

Software merupakan lisensi perangkat lunak komputer dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan pemeringkatan atas PT Jamkrida Jabar dan sistem SDM PT Jamkrida Jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

13. UTANG RE/COGARANSI

Utang Re/Cogaransi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)	5.358.901.111	3.579.824.307
PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE)	1.150.544.056	992.464.307
PT Jamkrida Jakarta	43.606.536	--
Jumlah Utang Re/Cogaransi	6.553.051.703	4.572.288.614

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

13. UTANG RE/COGARANSI (LANJUTAN)

Utang kepada broker *Best One Asia Reinsurance Broker* (BOARE), PT Jamkrida Jakarta dan PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi (JAKRE) merupakan utang premi IJP dan IJK yang harus dibayarkan Perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif yang ditetapkan Perusahaan.

14. UTANG KLAIM

Utang Klaim pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Klaim	1.914.592.578	--
Jumlah Utang Re/Cogaransi	1.914.592.578	--

Utang klaim merupakan kewajiban kepada penerima penjaminan dimana beban klaim telah disetujui oleh Komite Klaim namun belum dilakukan pembayaran.

15. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya Komisi Agen	188.898.344	233.848.835
Biaya Pegawai Yang Masih Harus dibayar	85.141.945	125.489.067
Cadangan CSR	78.158.213	--
Beban Umum yang masih harus dibayar	25.045.023	539.063.160
Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar	377.243.525	898.401.062

Merupakan kewajiban Perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, biaya keamanan, insentif dan uang makan, transport, uang lembur karyawan dan biaya komisi agen bulan Desember 2020 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

16. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penampungan IJP Bank Umum	4.270.417.568	2.252.388.939
Penampungan IJP Bank Syariah	1.072.690.541	789.208.723
Penampungan IJP Bank BPR	658.710.900	614.502.883
Jumlah Penampungan Sementara IJP	6.001.819.009	3.656.100.545
Penampungan Sementara Subrogasi	131.705.625	352.451.968
Jumlah Penampungan Sementara	6.133.524.634	4.008.552.513

Akun Penampungan IJP terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK)-nya, serta kelebihan pembayaran IJP dan IJK.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak Re/Cogaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

17. UTANG LANCAR LAINNYA

Utang lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Lancar Lain-lain	5.245.250	196.850
Utang Pembayaran Premi BPJS	--	12.697.472
Jumlah Utang Lancar Lainnya	5.245.250	12.894.322

Merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun terdiri dari Utang kendaraan dan premi BPJS.

18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Pendek	28.876.492.800	27.944.235.566
Imbal Jasa Kafalah Jangka Pendek	2.384.861.099	4.129.127.225
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	31.261.353.899	32.073.362.791

b. Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbal Jasa Penjaminan Jangka Panjang	86.106.264.138	143.234.391.853
Imbal Jasa Kafalah Jangka Panjang	5.699.599.435	8.060.692.545
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	91.805.863.573	151.295.084.398

Imbal Jasa Penjaminan dan Imbalan Jasa Kafalah diterima dimuka merupakan pembayaran IJP dan IJK penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Besarnya tarif imbal jasa penjaminan ditentukan berdasarkan hasil dari identifikasi hak dan kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, dalam perspektif bisnis penjaminan, hak dan kewajiban dimaksud merupakan risiko yang akan dan telah dialihkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam kontrak. Kontrak dimaksud memiliki jangka waktu pelaksanaan, maka dari itu kewajiban pelaksanaan entitas diukur berdasarkan risiko yang akan dan telah dilepas sepanjang kontrak berlaku.

Pendapatan imbal jasa penjaminan diakui sejak bulan sertifikat penjaminan diterbitkan dan diamortisasi sesuai dengan besarnya risiko yang terealisasi sepanjang jangka waktu penjaminan.

19. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Awal	4.050.464.351	3.192.039.354
Penyesuaian atas Implementasi PSAK 71	(293.252.828)	--
Pembentukan Cadangan Klaim	8.136.503.518	858.424.997
Pemulihan Cadangan Klaim	(5.411.118.300)	--
Jumlah Cadangan Klaim	6.482.596.741	4.050.464.351

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim minimal yang dibentuk telah sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak jaminan, cadangan klaim dihitung menggunakan basis *Estimated Credit Loss (ECL)* dengan memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi terkait yang berhubungan dengan kemungkinan klaim terjadi.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.967.916.012	1.389.732.898
Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	379.237.368	386.292.140
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2.347.153.380	1.776.025.038

Standar akuntansi PSAK 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2015 dan diterapkan secara retrospektif.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Perhitungan kewajiban imbalan pasca kerja berikut didasarkan pada Laporan Aktuaris yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

Imbalan Pasca Kerja

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	1.967.916.012	1.389.732.898
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	1.967.916.012	1.389.732.898
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	1.967.916.012	1.389.732.898

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kewajiban awal periode	1.389.732.898	1.002.885.657
Beban yang diakui di laba/rugi	382.309.801	334.786.287
Kerugian (keuntungan) komprehensif lainnya	195.873.313	52.060.954
Penyesuaian atas koreksi	--	--
Pembayaran Manfaat	--	--
Kewajiban akhir periode	1.967.916.012	1.389.732.898

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya jasa kini	272.359.620	250.524.175
Biaya bunga	109.950.181	84.262.112
Biaya jasa lalu vested	--	--
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	382.309.801	334.786.287

d. Pengakuan (Keuntungan) Kerugian Aktuaria

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Keuntungan) kerugian aktuaris yang belum diakui pada awal periode akuntansi	--	--
(Keuntungan) kerugian aktuaris - kewajiban	195.873.313	52.060.954
Jumlah (keuntungan) kerugian aktuaris yang diakui	195.873.313	52.060.954

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

e. Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Keuntungan) kerugian aktuarial dari kewajiban	195.873.313	52.060.954
Perubahan lainnya	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui	195.873.313	52.060.954

f. Akumulasi Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya yang diakui

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya awal periode	--	--
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	195.873.313	52.060.954
Saldo Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya akhir periode	195.873.313	52.060.954

Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Program Imbalan Kerja jangka Panjang Lainnya berdasarkan Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk cuti besar.

Perusahaan memberikan 2 (dua) bulan cuti panjang bagi karyawan yang masih aktif selama 6 (enam) tahun masa kerja dan kelipatannya yang akan diberikan di tahun ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan), masing-masing selama 1 (satu) bulan.

a. Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset Program atas Aset dan Kewajiban

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	379.237.368	386.292.140
Nilai wajar Aset	--	--
Status Pendanaan	379.237.368	386.292.140
Jumlah lain yang diakui	--	--
Kewajiban diakui di laporan posisi keuangan	379.237.368	386.292.140

b. Mutasi Kewajiban dan Aset yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kewajiban awal periode	386.292.139	263.941.538
Beban yang diakui di laba/rugi	99.380.010	84.355.559
Kerugian (Keuntungan) Komprehensif Lainnya tahun berjalan	(106.434.782)	37.995.042
Kewajiban akhir periode	379.237.368	386.292.139

c. Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Biaya jasa kini	68.476.639	61.920.528
Biaya bunga	30.903.371	22.435.031
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan Laba Rugi	99.380.010	84.355.559

d. Beban yang Diakui di Laporan Komprehensif Lainnya

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pengukuran kembali aset imbalan pasti neto	(106.434.782)	37.995.042
Jumlah Beban yang Diakui di Laporan komprehensif lainnya	(106.434.782)	37.995.042

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

Asumsi utama yang digunakan sebagai berikut:

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2020 dan 2019 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan *Projected Unit Credit Actuarial Cost Method*, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tingkat Diskonto	7,0%	8,0%
Kenaikan Gaji per Tahun	6%	6%
Tabel Mortalita	100% TMI4	100% TMI3
Tingkat Cacat	10% TMI4	10% TMI3
Usia Pensiun Normal	58 tahun	58 tahun

21. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Utang Pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PPh 4 ayat 2	99.540.762	103.593.388
PPh Pasal 21	257.844.813	251.694.221
PPh Pasal 23	33.097.891	28.285.399
Jumlah Utang Pajak	390.483.466	383.573.008

Utang pajak PPh Pasal 21 adalah utang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2020 yang menjadi tanggungan perusahaan dan pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan. Utang pajak Pasal 23 adalah utang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Laba Sebelum Pajak	4.193.112.318	3.515.875.248
Perbedaan Temporer:		
Beban Imbalan Pasca Kerja	481.689.811	419.141.846
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	(49.868.405)	(854.519.479)
Kenaikan Cadangan Klaim	(2.725.385.218)	858.424.997
Jumlah	(2.293.563.812)	423.047.364
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	414.058.358	701.938.413
Beban Perjalanan Dinas	412.680.104	804.605.817
Tunjangan Kesehatan	375.707.178	486.148.852
Beban Umum Lainnya	231.211.023	266.210.315
Beban Representasi	211.471.923	320.123.554
Tunjangan Baju	122.422.400	116.487.000
Beban Diklat Karyawan	133.790.000	257.097.201
Pemeliharaan Kendaraan	84.854.973	112.289.676
Denda Pajak	--	6.293.960
Rugi Reksadana yang belum terealisasi	--	710.345
Jumlah	1.986.195.959	3.071.905.133

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

21. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Bunga Deposito Dan Bagi Hasil	(10.253.007.228)	(10.804.553.741)
Pendapatan Obligasi	(4.937.908.711)	(3.243.534.592)
Pendapatan Jasa Giro	(302.108.247)	(79.011.330)
Keuntungan Penjualan Surat Berharga	(2.071.648.648)	(732.192.327)
PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	2.040.065.357	2.161.028.563
PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	726.696.039	486.585.338
PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	60.333.832	37.340.990
PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	310.387.079	132.960.375
Jumlah	(14.427.190.527)	(12.041.376.724)
Jumlah koreksi fiskal	(14.734.558.380)	(8.546.424.227)
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(10.541.446.061)	(5.030.548.979)
Rugi (dibulatkan)	(10.541.446.000)	(5.030.548.000)
Kerugian Pajak Tahun 2013	--	--
Kerugian Pajak Tahun 2014	--	--
Kerugian Pajak Tahun 2015	--	(2.599.512.000)
Kerugian Pajak Tahun 2016	(1.773.305.000)	(1.773.305.000)
Kerugian Pajak Tahun 2017	(8.520.565.000)	(8.520.565.000)
Kerugian Pajak Tahun 2018	(7.826.711.000)	(7.826.711.000)
Kerugian Pajak Tahun 2019	(5.030.548.000)	--
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(33.692.575.000)	(25.750.641.000)

d. Pajak Tangguhan

31 Desember 2020				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(584.651.979)	--	573.680.930	(10.971.049)
Cadangan klaim Bersih - Setelah dikurangi Piutang Estimasi	1.012.616.087	--	(413.031.340)	599.584.747
Beban Imbal Pasca Kerja	404.944.321	22.359.633	89.069.790	516.373.744
Selisih Nilai Wajar Keuntungan Surat Berharga Tersedia Untuk Dijual	--	494.481.563	--	494.481.563
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	--	--	3.313.341.073	3.313.341.073
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6.437.660.500	--	974.706.000	7.412.366.500
Jumlah	7.270.568.929	516.841.196	4.537.766.453	12.325.176.578
31 Desember 2019				
	Saldo Awal	Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Laba Rugi	Saldo Akhir
Selisih penyusutan aset tetap	(371.022.109)	--	(213.629.870)	(584.651.979)
Cadangan klaim	798.009.838	--	214.606.249	1.012.616.087
Beban Imbal Pasca Kerja	277.644.861	22.513.999	104.785.461	404.944.321
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	6.151.387.000	--	286.273.500	6.437.660.500
Jumlah	6.856.019.590	22.513.999	392.035.340	7.270.568.929

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

22. EKUITAS

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Penyertaan Modal	153.200.000.000	153.200.000.000
Cadangan Umum	35.601.299.677	4.094.651.887
Saldo Laba	8.730.878.772	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	2.433.087.844	87.155.374
Selisih pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja	216.198.139	(211.204.526)
Jumlah Ekuitas	200.181.464.431	161.078.513.323

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan:

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 145.000 (seratus empat puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar Rp 145.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a. Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp 25.000.000.000.
 - b. Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 75.000.000.000.
 - c. Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp 45.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar Rp 200.000.000.

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT Jamkrida Jabar.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp 50.000.000.000, Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 25.000.000.000,-.

PT Jamkrida Jabar telah menerima setoran modal tahap ke tiga dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp 45.000.000.000,- pada tanggal 10 Desember 2015.

Berdasarkan akta No. 11 tanggal 16 Agustus 2017 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT Jamkrida Jabar (keputusan sirkuler) memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 8.000 lembar saham atau sebesar Rp 8.000.000.000. Komposisi modal ditempatkan dan disetor PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	15.300	10.000.000	153.000.000.000	99,87%
YKP Bank BJB	20	10.000.000	200.000.000	0,13%
Jumlah	15.320	20.000.000	153.200.000.000	100%

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 11 tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh notaris Mohamad Juania, SH., M.Kn. para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2019 sebesar Rp 3.907.910.588, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jabar Nomor 03 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris Rita Evryani, SH., para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan Penggunaan Laba Bersih tahun 2018 sebesar Rp1.333.590.235, dibagi untuk Cadangan Umum sebesar 25%, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 2%, Dividen sebesar 51,10%, Tantiem dan Bonus sebesar 21,90%.

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

23. PENDAPATAN PENJAMINAN

Imbal jasa penjaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	130.550.626.733	47.732.911.078
Beban Akuisisi	(22.669.038.213)	(6.835.633.831)
Restitusi IJP	(2.467.490.149)	(1.773.299.834)
<i>Management Fee</i>	7.397.624.253	3.219.841.076
Jumlah Jasa Penjaminan Kredit	112.811.722.624	42.343.818.489

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK) adalah premi yang diterima oleh Perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dan IJK dihitung dari tarif IJP dan IJK, plafond kredit/pembiayaan dan jangka waktu kredit/pembiayaan.

Untuk kredit *eksisting*, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan.

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada Nomor: 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20% dari nilai Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Imbal Jasa Kafalah (IJK). Tarif biaya komisi agen dan *fee based income* bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit Sertifikat Penjaminan (SP) dan Sertifikat Kafalah (SK) dengan batas waktu maksimal 4 tahun.

Mulai November 2016 pengakuan Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Imbal Jasa Kafalah (IJK), *fee based income*, biaya komisi agen dan beban Re/Cogaransi diakui sesuai jangka waktu kredit.

Mulai tahun 2019 Komisi Agen/Broker dan *Fee Based Income* Bank dijadikan satu menjadi biaya akuisisi.

24. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Bunga Deposito Bruto	8.393.905.229	9.281.100.493
Pendapatan Kupon Obligasi Bruto	4.937.908.711	3.243.534.592
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Surat Berharga	2.071.648.648	732.192.327
Pendapatan Bagi Hasil Deposito Bruto	1.859.101.999	1.523.453.248
Pendapatan Sewa Properti	22.800.000	76.100.000
Pendapatan (Beban) Amortisasi Diskonto	(19.911.757)	79.011.330
Jumlah Pendapatan Investasi	17.265.452.830	14.935.391.990

25. BEBAN KLAIM

Beban klaim pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Klaim	42.487.066.581	22.636.374.896
Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Klaim	(2.725.385.218)	858.424.997
Beban Re/Cogaransi	57.600.884.828	14.268.883.642
Jumlah Beban Klaim	97.362.566.191	37.763.683.535

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

26. BEBAN USAHA

Beban usaha pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Sumber Daya Manusia	11.817.030.102	11.415.120.309
Beban Administrasi Kantor dan Umum	3.883.745.395	3.422.310.413
Beban Operasional	1.379.402.701	2.001.361.567
Jumlah Beban Usaha	17.080.178.198	16.838.792.289

Rincian Beban Operasional

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Promosi	502.102.882	701.938.413
Beban Perjalanan Dinas	412.680.104	804.605.817
Beban Kendaraan Dinas	294.284.160	327.058.417
Beban Penagihan Subrogasi	170.335.555	167.758.920
Jumlah Beban Operasional	1.379.402.701	2.001.361.567

Rincian Beban Sumber Daya Manusia

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Gaji dan Tunjangan Karyawan	5.504.089.271	5.171.983.204
Gaji dan Tunjangan Direksi	1.989.516.129	2.250.000.000
Beban Insentif	1.298.105.183	862.438.267
Beban PPH 21	1.236.509.240	1.218.392.433
Gaji dan Tunjangan Komisaris	550.333.333	499.000.000
Beban Imbal Pasca Kerja	481.689.811	419.141.846
Beban Purna Jabatan	472.500.000	553.500.000
Beban Pengembangan SDM	161.977.135	348.564.559
Gaji dan Tunjangan Dewan Pengawas Syariah	98.400.000	84.000.000
Tunjangan SDM Lainnya	23.910.000	8.100.000
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	11.817.030.102	11.415.120.309

Rincian Beban Administrasi Kantor dan Umum

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Umum	1.568.184.023	1.259.152.563
Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset	861.640.080	736.684.353
Beban Amortisasi <i>Software</i> dan Aset Lainnya	193.517.767	181.497.082
Beban Pemeliharaan dan Asuransi Aset	568.430.304	555.588.528
Beban Administrasi	379.771.055	300.765.028
Beban Komunikasi dan Energi	244.924.528	261.189.117
Beban Sewa	56.110.488	109.972.632
Beban Pajak - Pajak	11.167.150	17.461.110
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	3.883.745.395	3.422.310.413

27. PENDAPATAN SUBROGASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Subrogasi		
Pendapatan Subrogasi Penjaminan Bank	1.815.942.976	3.218.321.634
Jumlah Pendapatan Subrogasi	1.815.942.976	3.218.321.634

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

28. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	(302.108.247)	(187.292.542)
Pendapatan Lainnya	(196.397.037)	(253.595.615)
Rugi yang belum terealisasi	--	710.345
Jumlah Pendapatan Lain-lain	(498.505.284)	(440.177.812)
Beban Lain-lain		
- Beban Kenaikan CKKE Aset Keuangan	10.487.567.450	--
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Deposito	2.040.065.357	2.161.028.563
- PPh Pasal 4 (2) Kupon Obligasi	726.696.039	486.585.338
- PPh Pasal 4 (2) Penjualan Efek	310.387.079	132.960.375
- Beban Bukan Usaha Lainnya	130.717.250	1.443.587
- PPh Pasal 4 (2) Bunga Jasa Giro	60.333.832	37.340.990
Jumlah Beban Lain-lain	13.755.767.007	2.819.358.853
Jumlah (Pendapatan) Beban Lain-lain	13.257.261.723	2.379.181.041

29. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

30. INFORMASI TAMBAHAN

a. Kerja sama dengan perusahaan Asuransi

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah bekerja sama dengan pihak asuransi untuk melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan kredit multiguna/pembiayaan murabahah/mudharabah bagi penerima kredit/pembiayaan, kerugian yang ditanggung adalah kerugian akibat risiko kematian.

PT Jamkrida Jabar Unit Usaha Syariah telah melakukan perjanjian kerja sama dengan:

- Bank BJB Syariah
- BPRS HIK Parahyangan
- BPRS Al Masoem
- BPRS Patriot Kota Bekasi
- BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya

b. Jenis-Jenis Produk Penjaminan Syariah

- Kafalah Pembiayaan Umum
- Kafalah Pembiayaan Multiguna
- Kafalah Pembiayaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
- Kafalah Pembiayaan Mikro
- Kafalah Pembiayaan Kepada BPRS
- Kafalah Kontra Bank Garansi

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

30. INFORMASI TAMBAHAN (LANJUTAN)

c. Laporan Laba (Rugi) Syariah Tahun 2020 dan 2019

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Penjaminan		
Imbal Jasa Kafalah	7.879.651.786	4.646.908.540
Beban Akuisisi	(1.328.244.468)	(785.145.439)
Manajemen Fee	336.026.313	192.826.512
Restitusi IJP	(5.564.274)	(7.592.728)
Jumlah Pendapatan Penjaminan	6.881.869.357	4.046.996.885
Beban Klaim		
Beban Klaim	2.600.942.107	2.313.485.482
Pemulihan Cadangan Klaim	10	325.942.590
Beban Re/Cogaransi	3.018.204.152	1.130.190.940
Jumlah Beban Klaim	5.619.146.269	3.769.619.012
Pendapatan Penjaminan Bersih	1.262.723.088	277.377.873
Pendapatan Investasi	2.627.293.357	2.004.656.186
Pendapatan Subrogasi	53.339.078	75.152.296
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(437.495.669)	(260.063.865)
Beban Usaha	(1.004.873.212)	(973.337.591)
Laba Sebelum Pajak	2.500.986.642	1.123.784.899
Beban Pajak Kini	--	--
Manfaat Pajak Tangguhan	--	105.122.503
Laba Bersih Unit Syariah	2.500.986.642	1.228.907.402

31. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020, sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi	Setelah Reklasifikasi
Laporan Posisi Keuangan		
Aset Lain-lain	974.836.625	348.805.025
Aset Tetap - Bersih	11.699.143.923	12.325.175.523
Surat Berharga - Jangka Panjang	14.071.246.250	-
Surat Berharga	-	14.071.246.250

32. PENYESUAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71 dan PSAK 72, bersih setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada komponen ekuitas.

	Dampak Penerapan PSAK 71 dan PSAK 72
Cadangan Umum	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 23	4.094.651.887
Reklasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan berdasarkan PSAK 71	--
Pengakuan kerugian ekspektasian berdasarkan PSAK 71 setelah pajak	(6.020.258.829)
Penyesuaian atas pengakuan biaya penjaminan ulang	(42.003.950.704)
Penyesuaian atas pengakuan biaya-biaya perolehan terkait	(15.291.673.598)
Penyesuaian atas pengakuan pendapatan sesuai dengan PSAK 72	93.845.553.275
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71	34.624.322.030

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

32. PENYESUAIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71 dan PSAK 72 pada laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020:

	Sebelum Penyesuaian	1 Januari 2020 Efek Penyesuaian Transisi Penerapan PSAK 71 dan 72	Setelah Penyesuaian
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas - Bersih	171.333.693.369	(4.421.648.791)	166.912.044.578
Surat Berharga - Bersih	49.163.245.665	(151.425.000)	49.011.820.665
Piutang Re/Cogaransi	3.455.037.602	4.764.240.760	8.219.278.362
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	1.089.865.915	--	1.089.865.915
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	18.399.378.341	--	18.399.378.341
Piutang Lain-lain	123.387.312	--	123.387.312
Properti Investasi	2.472.000.000	--	2.472.000.000
Aset Tidak Lancar			
Beban Dibayar Dimuka	94.168.001.739	(57.295.624.303)	36.872.377.436
Aset Tetap - Bersih	12.325.175.523	--	12.325.175.523
Aset Pajak Tangguhan	7.270.568.929	--	7.270.568.929
Aset Lain-Lain	348.805.025	--	348.805.025
Liabilitas			
Liabilitas Lancar			
Utang Pajak	383.573.008	--	383.573.008
Utang Re/Cogaransi	4.572.288.614	--	4.572.288.614
Beban yang Masih Harus Dibayar	898.401.062	--	898.401.062
Penampungan Sementara	4.008.552.513	--	4.008.552.513
Utang Lancar Lainnya	12.894.322	--	12.894.322
Pendapatan Diterima Dimuka	32.073.362.791	--	32.073.362.791
Liabilitas Tidak Lancar			
Pendapatan Diterima Dimuka	151.295.084.398	93.845.553.275	57.449.531.123
Cadangan Klaim	4.050.464.351	(6.211.425.798)	10.261.890.149
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	1.776.025.038	--	1.776.025.038
Ekuitas			
Modal Saham	153.200.000.000	--	153.200.000.000
Cadangan Umum	4.094.651.887	30.529.670.142	34.624.322.028
Saldo Laba	3.907.910.588	--	3.907.910.588
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga			
Setelah Aset Pajak Tangguhan	87.155.374	--	87.155.374
Selisih Pengukutan Kembali Kewajiban			
Imbalan Pasca Kerja	(211.204.526)	--	(211.204.526)

33. PERJANJIAN DAN PERIKATAN

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dan perikatan, sebagai berikut:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit mikro dan kecil, penjaminan kredit usaha.
- PT Nusantara Insurance Broker perihal Progran Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten perihal penjaminan kredit modal kerja konstruksi, dan pengadaan barang/jasa.
- PT Brocade Insurance Broker tentang Program Tanggungan Asuransi BJB Kredit Konsumer.
- PT Jamkrida Banten perihal Kafalah Bersama (KOGARANSI)
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT BPR Syariah Artha Fisabilillah perihal Kafalah Pembiayaan Umrah.
- PT Rawikara Sembawa Mandiri tentang Mitra Keagenan Penjaminan pemberian penjaminan kredit/pembiayaan untuk membantu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

33. PERJANJIAN DAN PERIKATAN (LANJUTAN)

- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).
- PT Wahana Sentra Artha perihal Penjaminan Kredit Konsumtif.
- PT Jakarta Inti Bersama Insurance Brokers perihal Jasa Konsultan dan Keperantaraan Penjaminan Kredit Konsumtif yang disalurkan oleh LKM.
- PT Estetika Jasatama perihal Program Penjaminan Kredit Konsumer.
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Kalibesar Raya Utama perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Hayura Artalola perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Kredit Konsumtif Pada PT Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Konsumtif dan Kredit Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Sinar Mas Pelita perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha kepada Koperasi dan Perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM)
- PT Adonai Pialang Asuransi perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Jabar Banten Syariah perihal Kafalah Pembiayaan (*Cash Loans & Non Cash Loans*)
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perihal Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Pasundan perihal Penjaminan Kredit Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Patriot Bekasi tentang Kafalah Pembiayaan Konsumtif Pola Potong Tunjangan Sertifikasi Guru.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- Koperasi Simpan Pinjam (Kospin Jasa) dengan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penjaminan Bersama Pinjaman Produktif.
- PT Global Risk Management perihal Penyelenggaraan Program Penjaminan Pembiayaan Konsumtif pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Unit Usaha Syariah Melalui Mekanisme Pialang Asuransi.
- PT Fresnel Perdana Mandiri perihal Program Penjaminan BJB Kredit Konsumer.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria perihal Kafalah Pembiayaan Produktif.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Pola Potong Gaji.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Madinah Tasikmalaya perihal Kafalah Pembiayaan Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Pola Potong Gaji.
- PERUM Bank Perkreditan Rakyat Garut perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- PT Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura perihal Penjaminan Kredit Modal Usaha Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

34. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 12 April 2020.